

HISTORY OF THE BIRTH OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

Sejarah lahirnya commonwealth Of Australia

Anita^{1*}, Chairunisa Muh.Said²

¹² Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Flores

nitazulfikar26@gmail.com

(*) Corresponding Author
 nitazulfikar26@gmail.com

How to Cite: Anita (2025) Sejarah lahirnya commonwealth Of Australia .

doi: 10.36526/js.v3i2. 5235

Received : 22-04-2025
 Revised : 25-04-2025
 Accepted: 03-05-2025

Keywords:
 history,
 birth,
 Commonwealth Of
 Australia

Abstract

The establishment of the Commonwealth of Australia on January 1, 1901, marked a significant milestone in the nation's history. The process of forming the Australian federation involved a long series of negotiations, driven by the need to unite six previously separate colonies to create a stronger, more organized country. This article reviews the lengthy journey towards federation, starting with British colonial policies, the disagreements that arose between colonies, and the influence of grassroots movements in accelerating the process through referendums held in 1898 and 1899. Delays in the constitution's approval by colonial parliaments and the proclamation by Queen Victoria in September 1900 highlight the challenges faced in forming a federation. External factors, such as the threat of European powers in the Pacific and international tensions, also played a role in motivating the colonies to unite. Additionally, the desire to create a more efficient system of government in areas such as trade, defense, and immigration contributed significantly to the push for federation. This article also discusses the internal and external political factors that influenced the formation of the states, as well as how this federation led to the creation of a stronger national identity for Australia. By examining this process, the article provides a deeper understanding of how Australia transformed from separate colonies into a modern, independent federation.

PENDAHULUAN

Australia, atau sering dikenal sebagai Benua Kangguru, merupakan satu-satunya benua yang sepenuhnya terletak di belahan bumi selatan dan telah berkembang menjadi negara maju yang penting di kawasan Asia-Pasifik. Australia memiliki luas sekitar 7.682.300 km², menjadikannya sebagai negara terbesar di kawasan tersebut dan menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh dalam ekonomi global. Namun, meskipun Australia memiliki keunggulan ekonomi dan kualitas hidup yang tinggi, sejarah kelahirannya sebagai sebuah negara federasi modern mencerminkan perjalanan panjang yang melibatkan penjelajahan, kolonialisasi, dan evolusi sistem pemerintahan yang sangat unik. Gap penelitian terkait topik ini terletak pada pemahaman tentang dampak kolonialisasi Inggris terhadap pembentukan struktur sosial, politik, dan budaya yang ada di Australia pada awal abad ke-20, serta bagaimana peristiwa-peristiwa kunci ini mempengaruhi pembentukan identitas nasional Australia hingga saat ini.

Pada tahun 1770, penjelajah Inggris, James Cook, memetakan dan mendeklarasikan pantai timur Australia sebagai bagian dari teritori Inggris. Penjelajahan ini menandai dimulainya proses kolonialisasi yang berlangsung hampir dua abad. Pada tahun 1788, Armada Pertama Britania yang dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip tiba di Sydney dan mendirikan koloni pertama yang disebut sebagai New South Wales. Koloni ini didirikan dengan tujuan utama untuk menampung para narapidana yang dikirim dari Inggris. Kolonialisasi ini bukan hanya melibatkan pemukiman Eropa tetapi juga berimplikasi besar terhadap masyarakat asli Australia, yaitu suku Aborigin dan Torres Strait Islanders, yang mengalami pengusiran dan penurunan populasi akibat kebijakan-kebijakan

kolonial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak kolonialisasi terhadap masyarakat asli Australia masih terus berlanjut dalam bentuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang terlihat dalam data demografis dan kebijakan publik Australia modern (Smith, 2020). Gap penelitian terletak pada pengaruh jangka panjang dari kebijakan kolonial terhadap pembentukan struktur sosial di Australia dan bagaimana hal ini membentuk hubungan antar kelompok etnis di negara tersebut.

Setelah terbentuknya Persemakmuran Australia, negara ini menjalani serangkaian transformasi penting yang mengarah pada pembentukan negara demokratis dengan sistem pemerintahan yang stabil. Australia menjadi anggota Persemakmuran, dan meskipun tetap memiliki hubungan erat dengan Inggris, negara ini mulai menegaskan kedaulatannya dalam berbagai urusan internasional dan domestik. Dengan populasi yang terus berkembang dan hampir 60% dari mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane, Australia mengalami modernisasi yang pesat, baik dalam sektor industri maupun politik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Australia berhasil menciptakan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai demokrasi liberal yang stabil (Williams, 2023). Gap penelitian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pergeseran politik pasca-federasi ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia dan kontribusinya terhadap sistem ekonomi global saat ini.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Menurut Creswell (2009), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau *library research*, adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Menurut Sugiyono (2018:12), "Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada kenyataan/gejala/fenomena yang tergolong relatif tetap, konkrit, dapat diamati, terukur, dan gejala bersifat sebab akibat

HASIL PENELITIAN

Tinjauan Singkat Lahirnya Commonwealth of Australia

Proses kelahiran Commonwealth of Australia melibatkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Inggris dan dinamika internal koloni-koloni yang terbentuk di Australia. Selama lebih dari lima dekade sejak Inggris membuka koloni pertama di New South Wales pada 1788, terwujudlah koloni-koloni lain yang dikenal dengan nama Tasmania, Queensland, Australia Barat, Victoria, dan Australia Selatan. Dengan demikian, hampir seluruh wilayah benua Australia telah diduduki oleh Inggris, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi pembentukan federasi negara yang dikenal dengan nama Persemakmuran Australia. Penelitian oleh Evans dan Wright (2020) menunjukkan bahwa meskipun pemukiman Eropa di Australia membawa kemajuan ekonomi, kolonialisasi ini juga menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam bagi masyarakat asli Australia, yang masih terasa hingga saat ini.

Pada 1850, pemerintah Inggris mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan Koloni Australia (*Australian Colonies Government Act*), yang memberikan kesempatan kepada koloni-koloni untuk menyusun sistem pemerintahan mereka sendiri, namun tetap berada dalam naungan

kekuasaan Inggris. Menurut sejarah yang dicatat oleh Siboro (1996), undang-undang ini memberikan kebebasan relatif kepada koloni-koloni untuk menentukan arah pemerintahan mereka, meskipun tetap berstatus sebagai koloni Inggris. Keputusan untuk membiarkan koloni-koloni ini mengatur diri sendiri tanpa memperhatikan hubungan antar koloni yang lainnya secara tidak langsung mendorong perpecahan dalam pengelolaan wilayah Australia. Hal ini menciptakan perbedaan signifikan dalam kebijakan, sistem administrasi, dan juga hubungan sosial antar koloni, yang pada gilirannya mengarah pada pengembangan budaya politik yang terpisah.

Satu hal yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana kebijakan tersebut berperan dalam pengembangan identitas politik masing-masing koloni. Manning Clark (1986) menyebut bahwa pembagian Australia menjadi enam koloni, seperti yang dilakukan melalui Australian Colonies Government Act 1850, dapat dianggap sebagai "kesalahan historis" karena kebijakan tersebut memisahkan kawasan yang seharusnya dapat lebih mudah dipersatukan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan nasionalisme dan kesadaran politik yang lambat dalam skala benua. Gap yang muncul di sini adalah ketidakmampuan koloni-koloni ini untuk melihat dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut, yang berpengaruh terhadap pola pertumbuhan politik Australia yang terpecah. Penelitian oleh Foster (2021) menyoroti bagaimana kebijakan pemerintahan kolonial mempengaruhi pola ekonomi dan sosial Australia hingga akhir abad ke-19, termasuk permasalahan ketimpangan antar wilayah dan kolonisasi yang melibatkan masyarakat asli.

Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh koloni-koloni ini akibat terpecahnya administrasi dan kebijakan terlihat pada berbagai masalah yang muncul, seperti kesulitan dalam menjalankan perdagangan antar koloni, ketidaksesuaian dalam pengaturan imigrasi, dan kebutuhan akan kebijakan yang seragam mengenai layanan publik seperti surat pos dan pembangunan infrastruktur. Salah satu isu penting yang dihadapi adalah masalah ketidakseragaman dalam peraturan imigrasi, terutama berkaitan dengan imigrasi Asia yang semakin meningkat pada akhir abad ke-19. Riset oleh McQueen (2019) menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk menyelaraskan kebijakan antar koloni membuat kebijakan terkait imigrasi menjadi sangat berbeda antar satu koloni dengan koloni lainnya, yang pada gilirannya memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan ini membuka ruang bagi perdebatan yang lebih luas tentang identitas Australia dan bagaimana seharusnya negara ini mengatur masa depannya.

Pada akhir abad ke-19, muncul kesadaran di kalangan politisi dan pemimpin kolonial akan pentingnya bersatu untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Salah satu tokoh penting yang memimpin upaya ini adalah Henry Parkes, yang dikenal sebagai "Bapak Federasi Australia." Pada tahun 1889, dalam pidatonya yang terkenal di Tenterfield, New South Wales, Parkes menyatakan bahwa Australia tidak bisa terus terpecah-pecah jika ingin menjadi negara yang kuat dan mampu bersaing di kancah internasional. Menurut Hall (2020), pidato ini menjadi titik balik dalam sejarah Australia, di mana Parkes berhasil membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan politisi koloni lainnya. Pemikirannya yang berbicara tentang pentingnya membentuk sebuah pemerintahan federal yang menyatukan seluruh koloni menjadi landasan bagi diskusi yang lebih lanjut mengenai federasi.

Penyatuan koloni-koloni ini akhirnya dimulai dengan dilaksanakannya pertemuan di Melbourne pada tahun 1890 yang dihadiri oleh para pemimpin koloni. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk menyelenggarakan Konvensi Federal Australia yang pertama pada tahun 1891 di Sydney. Sebagai bagian dari konvensi ini, masing-masing koloni mengirimkan delegasi untuk menyusun rancangan konstitusi yang akan membentuk dasar hukum bagi federasi yang akan datang. Konvensi ini, meskipun berhasil merumuskan dasar-dasar konstitusi, menemui banyak tantangan dalam tahap pengesahan. Gagasan federasi yang diperkenalkan pada masa itu tidak serta merta diterima dengan antusiasme, bahkan banyak politisi yang merasa bahwa proses ini terlalu lambat dan tidak menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.

Konvensi 1891, meskipun penting dalam pembentukan dasar-dasar federasi, tidak menghasilkan kesepakatan yang cukup untuk langsung mendirikan federasi. Ketika hasil dari konvensi ini diserahkan kepada parlemen masing-masing koloni, muncul ketidakpuasan di kalangan

rakyat yang menginginkan hasil yang lebih cepat. Hal ini menyoroti ketegangan antara keinginan rakyat untuk perubahan yang lebih cepat dengan kenyataan bahwa pembentukan federasi memerlukan waktu dan perundingan yang panjang. Menurut kajian oleh Johnson (2018), ketidakpuasan terhadap lambatnya proses ini menciptakan perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok politik dan sosial di Australia, yang pada akhirnya mempengaruhi proses politik selanjutnya.

Namun demikian, gagasan Henry Parkes dan Konvensi Federal 1891 tidak pernah padam begitu saja. Meskipun mengalami kemunduran, ide-ide tersebut terus berkembang dan akhirnya pada 1 Januari 1901, Australia resmi menjadi sebuah negara federasi dengan berdirinya Persemakmuran Australia. Konstitusi yang disusun pada Konvensi Federal 1891 akhirnya mendapatkan pengesahan oleh parlemen koloni dan diterima oleh rakyat Australia. Proses ini menandai lahirnya Australia sebagai negara federasi yang independen dan menjadi bagian dari sejarah penting dalam perkembangan politik dan sosial negara tersebut.

Pada akhir abad ke-19, meskipun ada dorongan kuat untuk menyatukan koloni-koloni di Australia, beberapa koloni menunjukkan sikap yang bervariasi terhadap gagasan federasi. Salah satunya adalah Australia Barat yang berkembang lebih lambat dan menunjukkan sikap yang kurang antusias terhadap gagasan ini. Sementara itu, Victoria menolak kehadiran Selandia Baru dalam federasi, sebuah keputusan yang mencerminkan kecemasan terhadap kemungkinan pengaruh eksternal yang dapat mengubah dinamika politik Australia. Di sisi lain, di New South Wales, federasi menyebabkan kebingungan dan perselisihan internal antara berbagai kelompok politik di parlemen. Tiga kelompok utama di parlemen New South Wales—kelompok yang mendukung perdagangan bebas, kelompok proteksionis, dan kelompok buruh—sering terlibat dalam persaingan untuk mendapatkan pengaruh politik. Ketegangan internal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan isu federasi dengan segera. Sebagai akibatnya, koloni-koloni lain merasa enggan untuk bergabung dalam federasi, mengingat New South Wales sebagai koloni tertua dianggap seharusnya menjadi pelopor dalam gerakan tersebut. Hal ini semakin memperburuk perpecahan antar koloni dan memperlambat proses menuju federasi yang lebih terorganisir (Gray & Evans, 2020).

Gerakan federasi mengalami kemunduran yang signifikan setelah konvensi pertama pada 1891, karena pengesahan konstitusi yang dihasilkan oleh konvensi tersebut tertunda. Ketidakpuasan di kalangan rakyat semakin meningkat karena mereka merasa bahwa para politisi bekerja terlalu lambat dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Ketidakmampuan politisi untuk menyelesaikan isu-isu tersebut mendorong lahirnya gerakan rakyat yang mendukung federasi dan menginginkan perubahan yang cepat. Salah satu organisasi yang memainkan peran penting dalam gerakan ini adalah Australia Native Association (ANA), yang mewakili orang-orang kelahiran Australia dan sangat mendukung ide federasi. Dr. John Quick, seorang anggota terkemuka liga federal yang berasal dari Bendigo, secara tegas mengusulkan agar konstitusi baru diputuskan oleh rakyat secara langsung melalui referendum, bukan oleh parlemen koloni yang terkesan lamban dalam pengambilan keputusan (Williams, 2021). Saran ini mencerminkan pergeseran dalam pendekatan terhadap federasi, di mana rakyat Australia diberi kesempatan untuk lebih terlibat dalam proses politik yang sebelumnya lebih dominan di tangan para politisi dan elit kolonial.

Pada tahun 1895, dalam konferensi di Corowa, saran Dr. Quick diterima sebagai pedoman baru untuk melaksanakan kampanye federalisme. Beberapa prinsip utama yang diusulkan adalah bahwa dorongan untuk federasi harus datang langsung dari rakyat, konstitusi baru harus disusun oleh konvensi yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, dan hasil draft konstitusi tersebut kemudian harus diserahkan kepada rakyat untuk diterima atau ditolak. Selain itu, Quick juga mengusulkan bahwa jika konstitusi tersebut diterima di dua atau lebih koloni, maka konstitusi itu harus disahkan oleh parlemen Inggris (Siboro, 1996). Saran ini merupakan langkah besar dalam memodernisasi pendekatan terhadap federasi dan memberi rakyat Australia kontrol lebih besar dalam menentukan nasib politik mereka.

Meskipun Konvensi Federal pertama pada tahun 1891 sudah menghasilkan kerangka dasar untuk konstitusi Australia, hasil dari konvensi ini diserahkan kepada parlemen di masing-masing koloni untuk disahkan. Namun, banyak hambatan yang muncul, menyebabkan pengesahan tertunda. Meskipun demikian, dorongan untuk federasi terus berkembang dan akhirnya pada tahun 1895, Henry Parkes, salah satu pemimpin utama gerakan federasi, digantikan oleh Edmund Barton sebagai pemimpin gerakan tersebut. Barton, yang didampingi oleh Alfred Deakin, semakin memperkuat gerakan untuk mengadakan konvensi federal kedua. Dengan dorongan kuat dari rakyat dan politisi yang lebih mendalam, konvensi federal kedua diadakan pada tahun 1897-1898 (Johnson, 2022).

Konvensi federal kedua ini dilaksanakan dalam tiga sesi yang diadakan di tiga kota besar, yaitu Adelaide, Sydney, dan Melbourne. Pada konvensi ini, hasil dari konvensi pertama diperbaiki dan disempurnakan untuk menciptakan konstitusi yang lebih matang. Konvensi federal kedua ini terinspirasi oleh konstitusi Amerika Serikat dan Kanada, serta memiliki beberapa elemen yang mirip dengan tradisi pemerintahan Inggris, terutama dalam hal struktur kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Sebagai contoh, mereka mengadopsi konsep referendum yang digunakan di Swiss untuk perubahan konstitusi, yang memberi rakyat hak untuk menerima atau menolak konstitusi yang diusulkan. Proses ini mencerminkan pentingnya partisipasi rakyat dalam keputusan-keputusan politik besar yang akan menentukan arah negara mereka di masa depan (Macmillan, 2021).

Dalam hal sistem pemerintahan, para peserta konvensi memiliki dua model pemerintahan federasi yang sangat berbeda untuk dipertimbangkan: model Kanada dan Amerika Serikat. Kanada menerapkan sistem yang menempatkan kekuasaan pemerintah pusat lebih dominan, dengan negara bagian hanya memegang kekuasaan tertentu yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi. Sebaliknya, Amerika Serikat menyebutkan dengan tegas kekuasaan yang dimiliki pemerintah federal, sedangkan kekuasaan lainnya dipegang oleh negara bagian. Dengan mempertimbangkan kedua sistem ini, konvensi federal kedua akhirnya memutuskan untuk mengadopsi sistem yang lebih mirip dengan model Amerika Serikat, dengan memberi negara bagian otonomi yang cukup besar namun tetap mengatur kekuasaan federal dengan batasan yang jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintahan pusat dan negara bagian, sesuai dengan kebutuhan Australia pada saat itu (Taylor, 2020).

Setelah konvensi federal kedua selesai, hasilnya diserahkan kembali kepada koloni-koloni untuk disetujui melalui referendum. Proses ini bukan hanya hasil dari perundingan elit politik, tetapi juga merupakan keputusan yang didorong oleh partisipasi rakyat. Melalui referendum yang diadakan pada tahun 1901, mayoritas koloni menyetujui konstitusi yang telah disusun. Dengan pengesahan ini, pada 1 Januari 1901, Australia secara resmi menjadi sebuah negara federasi yang dikenal dengan nama Commonwealth of Australia. Proses panjang yang dimulai dengan kebijakan kolonial Inggris yang terpecah-pecah ini akhirnya membawa Australia menuju pembentukan negara federasi yang lebih stabil dan terorganisir (Macmillan, 2021; Johnson, 2022).

Setelah melalui dua kali referendum pada tahun 1898 dan 1899, akhirnya draf konstitusi untuk Commonwealth of Australia memperoleh pengesahan dari rakyat Australia di seluruh koloni, kecuali Australia Barat. Proses referendum ini merupakan langkah penting dalam menentukan arah negara yang akan dibentuk, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memutuskan apakah mereka setuju dengan pembentukan federasi atau tidak. Australia Barat, meskipun menunda keputusan mereka, akhirnya juga menyetujui untuk bergabung dengan federasi pada tahun 1900. Dengan pengesahan konstitusi oleh parlemen Inggris pada bulan Juli 1900, konstitusi Australia baru diberlakukan pada 1 Januari 1901. Keputusan ini menandai lahirnya Commonwealth of Australia, yang terdiri dari enam koloni yang kemudian menjadi negara bagian: New South Wales, Tasmania, Victoria, Australia Selatan, Queensland, dan Australia Barat. Pengesahan ini tidak hanya mencerminkan dorongan dari politisi dan elit kolonial, tetapi juga merupakan hasil dari gerakan rakyat yang menginginkan federasi yang lebih kuat dan terorganisir. Proses ini menunjukkan bagaimana

demokrasi di Australia berkembang, di mana rakyat mulai terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan politik yang berdampak besar pada masa depan negara mereka (Macmillan, 2021).

Pada 17 September 1900, Ratu Victoria memproklamasikan berdirinya Commonwealth of Australia. Proklamasi ini secara resmi mengumumkan bahwa Australia, yang terdiri dari enam koloni yang telah bergabung menjadi negara bagian, kini merupakan negara federasi. Koloni-koloni yang menjadi bagian dari Persemakmuran ini adalah New South Wales, Tasmania, Victoria, Australia Selatan, Queensland, dan Australia Barat. Walaupun Australia Barat sebelumnya tidak ikut dalam referendum pertama, mereka diberikan kesempatan untuk menentukan apakah akan bergabung atau tidak. Menariknya, meskipun Australia Barat sebelumnya menunda keputusan mereka, pada akhirnya rakyat Australia Barat memilih untuk bergabung dengan federasi sebelum tanggal berlakunya Commonwealth of Australia pada 1 Januari 1901. Proses penggabungan ini menunjukkan bagaimana federasi tidak hanya mencakup wilayah yang telah terorganisir, tetapi juga membuka ruang bagi koloni-koloni untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam bingkai yang lebih besar, yakni Australia sebagai negara federasi. Dengan demikian, Australia resmi menjadi negara yang terorganisir dengan sistem pemerintahan yang lebih baik, meskipun prosesnya memakan waktu panjang dan penuh tantangan (Johnson, 2022).

Setelah pembentukan Commonwealth of Australia, negara ini menjadi bagian dari sekutu Inggris dalam menghadapi tantangan internasional, terutama dalam Perang Dunia II. Australia menjadi kubu pertahanan penting bagi Inggris dan Amerika Serikat, membuktikan hubungan erat antara Australia dan Inggris dalam banyak aspek, terutama dalam urusan militer dan pertahanan. Kehadiran Australia sebagai bagian dari sekutu dalam perang global ini juga mengukuhkan posisinya sebagai negara yang terlibat dalam geopolitik dunia pada awal abad ke-20. Meskipun Australia telah menjadi negara merdeka dalam bentuk Persemakmuran, kedekatannya dengan Inggris tetap dominan, baik dalam segi militer maupun hubungan politik internasional. Dalam konteks ini, Australia menunjukkan solidaritas dengan Inggris sebagai bagian dari Commonwealth, yang tercermin dalam peran aktifnya dalam mendukung upaya Inggris dan sekutunya dalam perang besar (Foster, 2021).

Seiring dengan pengesahan konstitusi dan pembentukan negara federasi, sistem pemerintahan demokrasi di Australia mulai berkembang pesat. Salah satu elemen yang paling menonjol dari sistem ini adalah keberadaan parlemen yang anggotanya dipilih dari keenam negara bagian Australia. Pada awalnya, persaingan politik di Australia didominasi oleh dua partai besar, yaitu Partai Konservatif dan Partai Liberal. Kedua partai ini menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan Australia pada masa itu. Namun, pada tahun 1891, Partai Buruh mulai berkembang, pertama kali muncul di New South Wales sebagai partai yang mewakili kepentingan kelas pekerja. Partai Buruh ini menjadi bagian penting dari lanskap politik Australia, yang mencerminkan pergeseran politik menuju perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak pekerja dan kondisi sosial-ekonomi kelas bawah. Keberadaan Partai Buruh menandai tahap penting dalam evolusi politik Australia, karena partai ini menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan perubahan sosial di negara tersebut (Macmillan, 2021).

Selain faktor-faktor politik internal, terdapat juga beberapa faktor eksternal yang mendorong gagasan dan gerakan pembentukan federasi Australia. Salah satu faktor utama adalah munculnya kekuasaan Eropa lainnya di kawasan Pasifik, seperti Jerman dan Prancis, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi semua koloni Australia. Ancaman dari kekuatan luar ini memotivasi koloni-koloni untuk bersatu dan menghadapi kemungkinan intervensi dari negara-negara Eropa. Selain itu, terdapat pula keinginan bersama untuk menjaga agar benua Australia hanya dihuni oleh orang-orang berkulit putih. Hal ini mendorong terciptanya ketentuan yang seragam mengenai kebijakan imigrasi, terutama terkait dengan orang-orang berkulit berwarna, khususnya imigrasi dari Cina. Tuntutan untuk memiliki kebijakan yang seragam ini mengarah pada perubahan besar dalam kebijakan imigrasi di Australia pada awal abad ke-20 (Evans & Wright, 2020).

Faktor lain yang turut mendorong pembentukan federasi adalah keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kerja sama di bidang perdagangan. Perbedaan dalam

kebijakan bea dan cukai antar koloni menjadi hambatan besar dalam memfasilitasi perdagangan antarkoloni. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menciptakan pengaturan yang seragam terkait masalah ini. Selain itu, serikat pekerja (trade union) yang berkembang pada waktu itu juga mendukung adanya ketentuan yang seragam dalam hal ketenagakerjaan di seluruh koloni. Mereka menuntut perlindungan hak pekerja yang lebih baik, yang dapat tercapai dengan adanya regulasi yang sama di seluruh wilayah Australia. Selain itu, perkembangan pesat dalam alat-alat komunikasi, seperti surat pos dan telegraf, juga memerlukan adanya pengaturan bersama agar seluruh koloni dapat terhubung secara efisien (Williams, 2021).

Dalam aspek pertahanan, kebutuhan untuk memiliki satu komando dalam menghadapi kemungkinan ancaman militer menjadi alasan penting bagi pembentukan federasi. Selama abad ke-19, ketegangan internasional dan potensi ancaman dari kekuatan luar, seperti Jepang dan Jerman, menyebabkan koloni-koloni di Australia menyadari pentingnya membentuk sebuah front pertahanan yang terkoordinasi. Oleh karena itu, pembentukan sebuah komando pertahanan yang terpadu menjadi salah satu tujuan utama dari federasi Australia. Tuntutan akan pengaturan pertahanan yang lebih efektif ini juga mendorong kesadaran bahwa Australia harus bergerak sebagai satu kesatuan, bukan sebagai entitas yang terpecah-pecah (Foster, 2021).

Akhirnya, perasaan kebanggaan untuk disebut sebagai orang Australia, melebihi kebanggaan kedaerahan seperti menjadi orang Victoria atau Tasmania, juga memainkan peran penting dalam mendorong federasi. Proses ini menciptakan rasa identitas nasional yang lebih kuat di kalangan rakyat Australia, di mana mereka mulai melihat diri mereka sebagai satu bangsa yang lebih besar daripada sekadar individu dari masing-masing koloni. Rasa kebanggaan ini menjadi salah satu pendorong utama bagi rakyat untuk mendukung gagasan federasi, mengingat manfaat yang dapat diperoleh dengan membentuk negara yang lebih terorganisir dan kuat di hadapan dunia internasional (Taylor, 2020).

Dengan pengesahan konstitusi dan pembentukan Commonwealth of Australia pada 1 Januari 1901, Australia resmi menjadi negara federasi yang kuat dan terorganisir. Faktor-faktor politik internal dan eksternal, serta dorongan dari rakyat dan politisi, menciptakan landasan yang kokoh bagi negara baru ini untuk berkembang sebagai negara merdeka, dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan modern.

PENUTUP

Lahirnya commonwealth of Australia sebagai wadah yang mempersatukan seluruh koloni inggris di australia itu, merupakan buah usaha para politisi, para pengusaha, para pekerja, rakyat yang ingin bersatu, sehingga tidak ada satupun golongan yang dapat mengaku paling berjasa untuk itu. Dorongan untuk mewujudkannya antara lain dimotori oleh berbagai liga federasi yang tumbuh dan berkembang di berbagai koloni, landasan konstitusional dan wujudnya dihasilkan lewat konvensi-konvensi federal, dan pengesahannya dikukuhkan lewat referendum bersama dengan munculnya abad ke 20 tanggal 1 Januari 1901, hadir pula satu calon negara baru yaitu the commonwealth of Australia

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, J. 2021. Sejarah Australia Dari Awal Penemuan Sampai pembentukan Commonwealth of Australia. Gorontalo: Oase Pustaka.
- Chauvel, Ricard Harry (ed).1992. Budaya Dan Politik Australia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Clark, Manning,A Short History of Australia, A New American Library, Ontario,1980
- Clark, M. (1986). A history of Australia. Melbourne University Press
- Evans, R., & Wright, B. (2020). The colonial legacy and its impact on Australian identity. *Australian Historical Journal*, 43(3), 56-72.
- Foster, D. (2021). Colonial economics and its long-lasting effects on Australia's social structure. *Australian Economic Review*, 32(1), 14-28.

- Gayet, Robert lacour, A Concise History of Australia. Penguin Books, Blackburn, 1976
- Gray, R., & Evans, K. (2020). Political conflicts and the road to federation in Australia. *Australian Political Science Review*, 34(3), 150-165.
- Grattan, Hartley, C, Intoducing Australia. Angus And Robdrtson, Sydney 1949.
- Green, P. (2019). *The formation of Australian Federation: A political and social analysis*. Melbourne University Press.
- Hall, M. (2020). Henry Parkes and the birth of Australian nationalism. *Political History of Australia*, 22(1), 50-64.
- Jones, R. (2021). The gold rush and its impact on Australian society. *Australian Historical Journal*, 45(2), 115-130.
- Johnson, C. (2018). The slow process of Australian federation and its social implications. *Australian Political Science Review*, 19(2), 89-103.
- Johnson, L. (2022). *The persistence of the federation debate: Political continuity and change*. *Australian Politics and History*, 12(2), 89-104.
- Macmillan, H. (2021). The creation of the Commonwealth: Australia's constitutional evolution. *Journal of Legal History*, 25(4), 103-118
- McQueen, H. (2019). Imigration policy and social tensions in Australia's history. *Australian Studies Journal*, 40(4), 121-135.
- Nugroho, 2019. *Karakteristik Benua Australia dan Antartika*. Klaten: Cempaka Putih.
- Smith, J. (2020). The long-term effects of British colonialism on the Aboriginal population of Australia. *Journal of Australian Indigenous Studies*, 12(3), 98-115.
- Siboro, J. 1989. *Sejarah Australia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Siboro, J. 1996. *Sejarah Australia*. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Siboro, S. (1996). *Sejarah Pembentukan Persemakmuran Australia*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Siboro, J. 1989. *Sejarah Australia*. Yogyakarta, Ombak.
- Taylor, A. (2020). Federalism and the making of modern Australia. *Political Studies Review*, 38(2), 74-89.
- Williams, L. (2023). Democracy and economic stability in post-federation Australia. *Australian Political Science Review*, 22(4), 200-214.
- Williams, J. (2021). The role of grassroots movements in shaping Australian federation. *Journal of Australian History*, 19(1), 45-60.